

## **MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DUKUNGAN SARANA PRASARANA**

**(Kasus di Desa Cikiruh Wetan dan Paniis Kabupaten Pandeglang)**

**Dirlanudin \*), Agus Syafari \*\*), Kandung Sapto Nugroho\*\*\*), Ika Arinia Indriyany\*\*\*\*)**

\*) Program Studi Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

\*\*\*) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jalan Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Kota Serang Banten

Email: \*)dirlanw2ok@untirta.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research tries to identify and analyze condition of infrastructure in Cikiruh Wetan Village Cikeusik Subdistrict Pandeglang Regency represent coastal area bordering with Regency of Lebak and Paniis Village Koroncong Subdistrict represent agriculture area bordering with Regency of Serang and look for alternative of empowering rural community appropriate with existing potency. The fundamental problem is that infrastructure development in both villages is still low and uneven, in addition the villages are categorized as underdeveloped villages. The research aims to analyze the condition of infrastructure in the villages and formulate models of community empowerment through the support of infrastructure. This research uses qualitative approach with case study method. Using qualitative analysis with qualitative data and quantitative data. Informant determined by purposive. Data Collection through Indepth Interview, observation and related documents. The research results found that the condition of existing infrastructure in the research location, both education infrastructure, health, transportation, economy and settlements is still relatively inadequate. Infrastructure development policy has been implemented, but the way of its implementation is still less patterned and less integrated, especially for villages located in the area bordering with Lebak and Serang Regency. Village community empowerment efforts have been gradually undertaken, but not consistently and systematically implemented, especially the realization of infrastructure development in accordance with the potential and needs of villages, guidance and monitoring of the community to the maintenance and using the infrastructure reasonably.*

**Keywords :** *infrastructure, community empowerment, development, policy*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten dengan luas 2.746,31 km<sup>2</sup> atau 29,98% dari luas wilayah Provinsi Banten dan terbagi dalam 35 kecamatan (BPS Pandeglang, 2017). Secara geografis, Kabupaten Pandeglang berbatasan darat langsung dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang yang memiliki karakteristik daerah pesisir, pertanian, kehutanan serta karakteristik kemiskinan yang relatif tinggi. Permasalahan di Pandeglang di antaranya ketimpangan antara wilayah utara dengan wilayah selatan. Potensi luas wilayah Pandeglang pada realitanya belum mampu dikelola secara maksimal berimbas pada berubahnya potensi menjadi masalah. Wilayah yang sangat luas mengakibatkan penyebaran ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur juga menjadi tidak merata. Selain itu penyebaran penduduk yang tidak merata pada wilayah perkotaan dan perdesaan juga berimbas pada perbedaan tingkat kemudahan penduduk terhadap berbagai fasilitas.

Penelitian ini berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada potensi ketersediaan infrastruktur yang ada di desa termasuk prasarana jalan, mengingat Desa Cikiruh

Wetan berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Desa Paniis berbatasan dengan Kabupaten Serang. Desa Paniis akses menuju sekolah masih ada yang menggunakan jalan setapak desa dengan bentuk jalan cor, sedangkan di Desa Cikiruh Wetan jalan sudah sangat baik. Mobilitas siswa dari Kabupaten Serang ke Desa Paniis mencapai 80 %, sedangkan di Cikiruh Wetan hanya 20 % dari Kabupaten Lebak.

Permasalahan mendasar adalah bahwa kedua desa tersebut masuk kategori desa tertinggal, pembangunan infrastruktur yang rendah dan kurang merata. Pemberdayaan masyarakat dilihat dari aspek penyediaan infrastruktur yang memadai, mulai dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi, sarana pendukung ekonomi dan prasarana pemukiman. Permasalahan yang ditemui, terkait sarana pendidikan di kedua desa tersebut tidak semua menyediakan sarana pendidikan tingkat menengah. Pada kesehatan, kebijakan sarana prasarana tidak diberlakukan seragam antar desa. Di bidang transportasi, kondisi jalan yang belum berkualitas masih menjadi tantangan masyarakat dan pemerintah setempat karena kuantitas jalan di dua desa cenderung sama. Terkait sarana pendukung ekonomi, data lapangan menunjukkan bahwa di Desa Paniis

fasilitas lebih tersedia terkait pasar desa dan irigasi jika dibandingkan dengan Cikiruh Wetan tetapi pasar desa Paniis yang ada tidak berfungsi bahkan mengalami kerusakan. Prasarana pemukiman berkaitan dengan ketersediaan air bersih, listrik dan jamban ternyata jauh lebih layak di Desa Paniis dibanding di Desa Cikiruh Wetan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis kondisi sarana prasarana di Desa Cikiruh Wetan dan Desa Paniis Kabupaten Pandeglang; 2) merumuskan model pemberdayaan masyarakat melalui dukungan sarana prasarana di Desa Cikiruh Wetan dan Desa Paniis Kabupaten Pandeglang.

Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian mendasar dari pembangunan nasional secara keseluruhan, untuk itu pemerintah telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai realisasi pembangunan yang dimulai dari pinggiran. Menurut Almasri dan Deswimar (2014), Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut

dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Jadi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah.

Masyarakat desa sangat membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung ekonomi desa agar tumbuh dan berkembang dengan cepat. Perkembangan ekonomi desa memberikan peluang berusaha bagi masyarakat desa dan menekan jumlah masyarakat miskin di desa (Kementerian Desa dan PDTT, 2016). Untuk itu sangat diperlukan sekali pembangunan infrastruktur (sarana prasarana) desa sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Menurut Asnudin (2005), Infrastruktur perdesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Selanjutnya hasil penelitian Asnudin (2009) disebutkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur perdesaan sekalipun cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, namun masih rendah tingkat keberlanjutannya. Karena itu dibutuhkan fokus perhatian proyek pada masa yang

akan datang, seperti: 1) meningkatkan aspek pengorganisasian masyarakat; 2) transparansi; 3) akuntabel; dan 4) berkelanjutan.

Hasil penelitian Widjajanti (2011) bahwa keberdayaan masyarakat perlu peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, tetapi untuk terselenggaranya pendidikan dengan baik perlu dukungan sarana prasarana pendidikan memadai. Namun demikian sarana prasarana pendidikan saja tidak cukup untuk menjadikan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, tetapi perlu didukung dengan sarana prasarana yang lain seperti sarana kesehatan, sarana transportasi, sarana ekonomi dan sarana pemukiman.

Hasil penelitian Pranadji (2006) tentang model pemberdayaan masyarakat pedesaan lebih menekankan pada penguatan modal sosial, belum menyentuh secara eksplisit terkait perlunya dukungan sarana prasarana bagi upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dengan demikian penelitian penulis terkait dukungan sarana prasarana bagi pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan karakteristik pesisir dan pertanian masih sangat layak untuk dilakukan kajian secara lebih mendalam, guna menghasilkan model pemberdayaan yang tepat sesuai kondisi sosial dan lingkungan setempat.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) yaitu sebuah pencarian fakta pada kejadian tertentu dengan interpretasi yang tepat. Menurut Creswell dalam Herdiansyah (2010), menyebutkan bahwa: “*Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting*”. Berdasarkan pemikiran Creswell, maka pendekatan kualitatif menekankan pada permasalahan sosial atau manusianya dengan mengkaji secara kompleks dan holistik terkait pola perilaku dalam konteks yang alami.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data kualitatif dan dukungan data kuantitatif. Analisis kualitatif berusaha untuk menuturkan deskripsi permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data dan informasi aktual. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai kondisi sarana prasarana yang ada di Desa, pembangunan sarana prasarana yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah, perilaku dan partisipasi masyarakat dalam memperbaiki, merawat serta memanfaatkan secara benar sarana prasarana yang telah dibangun.

Penelitian dilaksanakan di Desa Cikiruh Wetan Kecamatan Cikeusik dan Desa Paniis Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah bahwa Desa Cikiruh Wetan mewakili desa miskin dengan karakteristik pesisir yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak, sedangkan Desa Paniis juga mewakili desa miskin dengan karakteristik pertanian yang berbatasan dengan Kabupaten Serang. Pemilihan kategori desa miskin, karakteristik pesisir, pertanian dan berada di wilayah perbatasan yang berpotensi untuk dikembangkan, akan diperoleh gambaran bentuk pembangunan sarana prasarana yang tepat bagi masyarakat dengan topografi seperti itu serta upaya menjaga sarana prasarana yang ada sehingga dapat mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka dikemudian hari. Sedangkan waktu penelitian lapangan dimulai dari bulan September sampai dengan Nopember 2017, kegiatan penelitian ini bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pandeglang.

Subjek penelitian (informan) merupakan sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2002). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Untuk itu diperlukan subjek yang memenuhi kriteria dan karakteristik yang dapat mengungkap fenomena di atas, sehingga memungkinkan data diperoleh secara tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan karakteristik tersebut maka informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Cikiruh Wetan dan Paniis sebagai *key informan*, sedangkan *secondary informan* terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Dusun, tokoh masyarakat (wirausaha, pendidik, tenaga kesehatan dan agama)

Jenis data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil *Indepth Interview* (wawancara mendalam), meliputi beberapa gejala yang dialami oleh subyek dan perilaku yang ditampilkan oleh subyek dan hasil *observation* (pengamatan) yang merupakan temuan langsung yang diperoleh tim peneliti

selama berada di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa dokumen yang terkait dengan fokus dan sub-sub fokus kajian penelitian (data sarana prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi dan pemukiman).

## **HASIL**

### **Kondisi Sarana Prasarana di Desa Cikiruh Wetan dan Desa Paniis Kabupaten Pandeglang**

#### **Sarana Pendidikan**

Sistem pendidikan telah dilakukan dengan berbagai program dan metode yang tepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta perkembangan peradaban masyarakat, dimulai dari program wajib belajar 9 tahun yang telah dikembangkan saat ini minimal wajib belajar 12 tahun artinya warga negara Indonesia minimal berpendidikan SMA, SMK atau yang sederajat, diterapkan anggaran minimal 20 % dari APBN dan APBD, dialihkannya pengelolaan pendidikan SLTA dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, dilakukan pendidikan gratis, kartu Indonesia Pintar dan bantuan BOS dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Semua itu ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan sampai ke desa-desa, namun fenomena yang terlihat masih

menunjukkan kondisi yang belum menggembirakan, mulai dari ketersediaan sarana pendidikan yang belum memadai juga belum tersedianya sarana wajib belajar 12 tahun, tidak semua kecamatan memiliki sarana lembaga pendidikan tingkat SLTA, apalagi di tingkat desa, hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat percepatan peningkatan pendidikan usia remaja sampai minimal 12 tahun, belum lagi diperparah dengan kondisi ekonomi keluarga masyarakat desa yang sangat terbatas sehingga terkadang lembaga pendidikannya tersedia tetapi tidak mampu memberi ongkos anak bisa sampai ke sekolah tiap hari, ujung-ujungnya anak-anak hanya berakhir sampai pendidikan SLTP. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, memang hal ini ada beberapa kemungkinan, apakah benar sama sekali tidak ada alat transportasi di keluarganya seperti sepeda atau minta tolong pergi ke sekolah bersama teman-teman se-kampungnya yang memiliki alat transportasi atau semangat memang belajar anaknya yang rendah ditambah lagi orang tuanya yang kurang tegas mendorong anaknya untuk bersekolah atau bahkan kurang berusaha keras untuk mempersiapkan keperluan transportasi anak ke sekolah.

Tabel 1 menunjukkan data ketersediaan sarana pendidikan di desa perbatasan Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak (Desa Cikiruh Wetan

Kecamatan Cikeusik) dan yang berbatasan dengan Kabupaten Serang (Desa Paniis Kecamatan Koroncong), sebagai berikut:

Tabel 1. Sarana Pendidikan

<b>NO</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>DESA CIKIRUH WETAN</b>	<b>DESA PANIIS</b>
1	SMK	1	
2	SMP	1	
3	MTs	1	
4	SD	3	1
5	Madrasah Ibtidaiyah	1	
6	TK	2	
7	Madrasah Diniyah	2	2
8	PAUD		2

Sumber: Desa Cikiruh Wetan dan Paniis, 2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Cikiruh Wetan Kec. Cikeusik memiliki sarana pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan desa Paniis Kec. Koroncong. Berarti pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan lebih berpeluang besar di desa Cikiruh Wetan. Kondisi ini berpotensi bagi dukungan SDM dalam pengembangan sebagai daerah wisata pesisir, dengan catatan orang tua di Desa Cikiruh Wetan memberi motivasi dan memantau anak-anaknya secara konsisten untuk pergi kesekolah dan belajar di rumah dengan tekun serta tidak membiasakan anak-anaknya terlalu

banyak terlibat dalam kegiatan nelayan orang tuanya kecuali pada masa liburan sekolah.

Begitu juga bagi masyarakat Desa Paniis, meskipun sarana pendidikan belum tersedia terutama SMP dan SMA/SMK/MA di desanya namun tidak berarti berkurangnya semangat orang tua untuk mendorong putra-putrinya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebab di Desa Paniis Kecamatan Koroncong sebenarnya relatif memiliki jarak yang tidak jauh dari Ibu Kota Kabupaten Pandeglang sehingga sangat berpeluang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi minimal

mencapai 12 tahun (lulus SMA/SMK/MA), hal ini tentu membutuhkan kemauan kuat dari para orang tua untuk paling tidak menyediakan kebutuhan transportasi agar anak-anak mereka dapat sekolah secara berkelanjutan jangan sampai terputus di tengah jalan, di samping itu agar orang tua memantau semangat belajar mereka baik di rumah maupun disekolahnya, sehingga secara bertahap dapat diketahui perkembangannya, jangan hanya menyerahkan persoalan pendidikan dan pembelajaran hanya pada guru di sekolah. Selain anak-anak studi lanjut di lembaga pendidikan formal, jangan lupa orang tua terus mendorong mereka belajar agama di luar waktu belajar di sekolah umum secara konsisten yang selama ini sudah berjalan dengan baik di desanya.

Semua upaya menanamkan pendidikan pada putra-putrinya merupakan investasi yang sangat berharga bagi mereka dan keluarga di kemudian hari, sebab walaupun bagaimana pondasi pendidikan dan keterampilan yang kuat akan menentukan tingkat wawasan dan pola pikir seseorang untuk mengantisipasi kehidupan yang semakin kompleks dan kompetitif, yang pada gilirannya dapat mengubah dan meningkatkan pola kehidupan, taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pemerintah Daerah, instansi terkait, Kepala Desa, Lembaga Desa, tokoh pengusaha setempat, tokoh agama dan tokoh adat, organisasi kemasyarakatan dan akademisi, harus terus memikirkan dan melakukan langkah-langkah yang berarti bagi peningkatan sarana pendidikan secara kuantitas maupun kualitas, ketersediaan tenaga pengajar dan media belajar lainnya secara berkelanjutan. Khususnya di Desa Paniis dan Desa Cikiruh Wetan yang merupakan desa perbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak perlu dicari solusi bagi pengelolaan pendidikan secara terintegrasi dengan kedua Pemerintah Daerah tersebut, dengan merumuskan suatu kebijakan bersama yang *win-win solutions* bagi semua belah pihak, artinya ketiga pemerintah daerah tersebut perlu terus menjalin komunikasi dan kerjasama secara berkelanjutan, yang mengedepankan kebutuhan dan kemajuan masyarakat desa perbatasan dengan memperhatikan permasalahan dan potensi masing-masing desa.

### **Sarana Kesehatan**

Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan telah dikembangkan sejak pemerintahan orde baru sampai sekarang relatif sudah berjalan dengan baik, salah satu sarana kesehatan yang dilakukan sejak orde baru dan sampai sekarang



masih berlangsung adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Aktivitas lembaga kesehatan ini merupakan penjabaran dari lembaga kesehatan formal di kecamatan dan desa (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu). Sampai saat ini lembaga kesehatan masih sangat terbatas, misal Puskesmas hanya satu di tiap kecamatan ditambah beberapa Puskesmas Pembantu. Secara kebijakan lembaga kesehatan ini dibuat dan diberlakukan secara seragam di tiap Kecamatan maupun Desa, tetapi dalam implementasinya ternyata berbeda-beda dalam pengembangan pengelolaannya, di wilayah perkotaan biasanya jauh lebih memadai baik secara kuantitas maupun kualitas sarana dan tenaga medisnya, sementara di wilayah pedesaan justru sering terjadi sebaliknya.

Keberadaan sarana kesehatan merupakan salah satu penentu tingkat

kemajuan dan pola kehidupan suatu masyarakat yang dimulai dari aspek kesehatan, kemudian bila ditelaah lebih jauh dapat dibuktikan bahwa sarana kesehatan menjadi indikator bagi peningkatan gizi masyarakat yang selanjutnya diikuti dengan tingkat kecerdasan masyarakat tersebut, sebab dengan keberadaan sarana kesehatan yang berfungsi dengan maksimal akan mendorong dan mengingatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan pola hidup yang bersih, kecukupan gizi dan pemahaman untuk mengantisipasi timbulnya penyakit pada diri dan keluarganya. Tabel 2 menunjukkan masih sangat terbatasnya ketersediaan sarana layanan kesehatan yang ada di desa perbatasan, sebagai berikut:

Tabel 2. Sarana Kesehatan

NO	LEMBAGA KESEHATAN	DESA CIKIRUH WETAN	DESA PANIIS
1	Puskesmas	-	-
2	Puskesmas Pembantu	1	1
3	Posyandu	2	4

Sumber: Desa Cikiruh Wetan dan Paniis, 2017 (diolah)

Di bidang sarana kesehatan kedua desa tersebut relatif sama, walaupun Desa Paniis sedikit lebih baik (Posyandu lebih banyak). Namun demikian dalam jangka

panjang keterbatasan sarana kesehatan ini perlu ditingkatkan. Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu perlu dukungan jumlah para medis yang memadai, bila

tidak maka sarana lembaga kesehatan tersebut kurang begitu berarti bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Di samping itu yang perlu mendapat perhatian sejauhmana konsistensi berfungsinya posyandu-posyandu yang ada, karena lembaga kesehatan ini sebagai kepanjangan dari puskesmas dan puskesmas pembantu, hal ini terutama untuk pemantauan kesehatan, tumbuh kembang, serta kecukupan gizi balita dan anak-anak. Selain itu yang perlu ditelaah lebih jauh adalah sejauhmana masing-masing posyandu dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan oleh para kadernya, artinya kegiatan posyandu jangan hanya berfungsi ketika ada program dari pemerintah, setelah program habis anggarannya kemudian tidak berfungsi lagi. Monitoring dan evaluasi dari pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan terhadap berfungsinya posyandu apakah sudah dilakukan secara terus-menerus ? bila hal ini benar-benar dilakukan, maka akan memberi semangat pada para pengurus dan kader posyandu dalam menjalankan tugas layanan kesehatan.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat maka keberadaan lembaga kesehatan akan menentukan perubahan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, karena aktivitas setiap anggota masyarakat

akan jauh lebih baik bila diawali dengan kesehatan yang baik dan gizi yang memadai sehingga mendukung terciptanya generasi muda yang sehat dan kecerdasan yang memadai. Terkait dengan kesehatan masyarakat harus diawali dengan pemahaman masyarakat akan kesehatan, kemudian diterapkan dalam pola hidup kesehariannya, baik pola pikir maupun pola konsumsi, bila hal ini sudah melekat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk hidup sehat, maka dalam jangka panjang akan semakin tertanam dan terbentuk pola sikap hidup sehat di setiap anggota keluarga.

### **Sarana Prasarana Transportasi**

Mobilitas antar desa/daerah tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Guna mendukung mobilitas penduduk antar desa, Pemerintah Daerah telah melakukan pembangunan prasarana jalan dan jembatan. Dengan tersedianya prasarana tersebut, interaksi sosial, budaya dan transaksi bisnis antar penduduk dapat berjalan dengan baik, yang pada gilirannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi serta perubahan kehidupan yang lebih baik, terutama desa-desa yang secara geografis letaknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten dan daerah lain yang berpotensi untuk akses perekonomian dari desa-desa tersebut.

Sarana jalan telah dibangun di berbagai desa/daerah di wilayah Pandeglang, namun karena intensitas penggunaan jalan lebih banyak, karena pertumbuhan penduduk yang diikuti bertambahnya kendaraan, maka pelan tapi pasti akan menjadi tidak seimbang antara ruas jalan yang ada dengan jumlah kendaraan yang melintas. Terkait prasarana transportasi selain jumlah dan lebar ruas jalan, yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas jalan yang dibangun.

Sebenarnya tingkat kepadatan kendaraan untuk Desa Cikiruh Wetan dan

Desa Paniia relatif masih rendah, namun masih ada jalan-jalan yang kualitasnya kurang memadai. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kualitas jalan Desa Cikiruh Wetan jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan jalan-jalan di Desa Paniis.

Hanya dari segi jarak ke Ibu Kota Kabupaten, Desa Cikiruh Wetan lebih jauh dibanding dengan Desa Paniis. Terkait dengan panjangnya jalan di kedua desa tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

NO	PRASARANA TRANSPORTASI	DESA CIKIRUH WETAN	DESA PANIIS
1	Jalan Desa	2.570 m	2.340 m
2	Jalan Lingkungan	2.850 m	2.790 m

Tabel 3. Prasarana Transportasi

Sumber: Desa Cikiruh Wetan dan Paniis, 2017 (diolah)

Secara kuantitas kedua desa tersebut relatif sama terkait dukungan sarana transportasi. Namun yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas jalan terutama untuk di desa Paniis sehingga kedua desa mempunyai peluang yang sama dalam pengembangan kehidupan desanya, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah terkait perawatannya secara berkelanjutan baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat setempat, dengan kualitas jalan yang baik akan memudahkan akses masyarakat untuk

ke luar daerahnya dan yang pasti akan meningkatkan nilai jual tanah/lahan di desa-desa tersebut serta berpeluang baik masuknya investasi dari luar.

Jadi keberadaan sarana transportasi akan sangat menentukan mobilats masyarakat desa dalam menjalankan berbagai aktivitas. Semakin baik dan memadai prasarana transportasi yang ada, maka semakin berpeluang bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas sosial, budaya, bisnis dan masuknya investasi, sehingga dapat mendorong iklim

ekonomi yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Untuk itu sistem transportasi harus memenuhi syarat yang memadai, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Imansyah (2017) bahwa “perencanaan sistem transportasi harus disertai dengan pengadaan prasarana yang memenuhi persyaratan serta kriteria transportasi yang meliputi: volume penampungan kendaraan, kecepatan rata-rata, arus kepadatan dan keamanan pengguna jalan. Selain itu harus memenuhi persyaratan lingkungan yang meliputi jenis permukaan, pengamanan penghuni sepanjang jalan, kebisingan, pencemaran udara, penghijauan dan penerangan”.

Untuk saat ini di kedua desa tersebut yang masih sangat dibutuhkan adalah terkait permukaan jalan, penerangan dan keamanan di jalan, karena desa-desa tersebut relatif masih tidak terlalu padat kendaraan. Bagi desa Cikiruh Wetan untuk permukaan jalan relatif sudah baik, tetapi penerangan dan keamanan masih perlu ditingkatkan, mengingat desa tersebut memiliki destinasi wisata bahari, hal ini agar wisatawan merasa nyaman dan tenang selama berkunjung disana. Untuk jangka panjang hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan serta perekonomian masyarakat desa. Sedangkan untuk Desa Paniis yang perlu

diperhatikan adalah permukaan jalan, penerangan dan keamanan, bila kriteria jalan ini terpenuhi maka akan sangat berpeluang masuknya investasi, memperlancar pengiriman hasil alam dan aktivitas penduduk semakin cepat karena desa ini relatif dengan kota-kota kabupaten dan yang terpenting manjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lebak terkait perawatan jalan di masa depan secara berkelanjutan.

### **Sarana Pendukung Ekonomi**

Masyarakat desa membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung ekonomi desa agar dapat berkembang lebih cepat. Perkembangan ekonomi desa akan memberikan peluang usaha bagi masyarakat desa dan menekan jumlah masyarakat miskin di desa. Ada banyak jenis sarana dan prasarana yang sebagian dapat mendukung ekonomi desa, salah satunya prasarana transportasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Selain sarana dan prasarana transportasi, menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2016:1) juga ada sarana prasarana lain sebagai pendukung ekonomi masyarakat desa yaitu:

Prasarana transportasi, elektrifikasi, telekomunikasi dan air bersih. Ada prasarana khusus pendukung ekonomi desa yaitu melalui pembangunan

sarana dan prasarana desa menciptakan kesempatan kerja untuk masyarakat desa, termasuk untuk perempuan dan masyarakat miskin.

Prasarana transportasi desa seperti jalan, jembatan dan tambatan perahu sangat penting untuk mendukung ekonomi desa, selain mendukung pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat desa. Kegiatan elektrifikasi desa juga mendukung pengembangan ekonomi desa karena masyarakat desa dapat bekerja sepanjang hari. Elektrifikasi juga mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan. Demikian juga telekomunikasi desa, dengan sarana telekomunikasi masyarakat desa dapat menerima informasi yang sangat penting dan membantu dalam pengembangan usaha. Adanya telekomunikasi desa, warga desa dapat mengetahui harga barang, kesempatan kerja dan perubahan aturan yang berlaku. Warga desa dapat memperoleh informasi bidang pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya menurut Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kementerian Desa PDTT bahwa:

Eksistensi desa langsung bersentuhan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa yang maju akan menjadi landasan yang kokoh dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu

program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada sarana dan prasarana pendukung ekonomi desa, terutama irigasi dan pasar desa. Rehabilitasi irigasi untuk mendongkrak produktivitas padi Indonesia saat ini turun lebih dari 50%. Selain itu kondisi pasar tradisional yang sebagian besar di desa, saat ini lebih dari 8.000 pasar sangat memprihatinkan. Sehingga perlu penanganan, bahkan perlu dibangun pasar baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.pasar desa. Konsep Trimatra, yakni jaring komunitas wiradesa, lumbung ekonomi desa, dan lingkaran budaya desa. Lumbung ekonomi desa diarahkan untuk mewujudkan 3 aspek, yaitu kedaulatan pangan, ketahanan energi dan kemandirian ekonomi desa.(<http://nasional.inilah.com/read/detail/2329674/sarana-dan-prasarana-desa-untuk-atasi-kemiskinan>).

Memperhatikan komitmen pemerintah di atas untuk membangun desa melalui berbagai kebijakan memperkuat sarana prasarana pendukung ekonomi desa, terutama pembangunan irigasi dan pasar desa, maka sebenarnya sangat optimis bahwa desa-desa akan tumbuh perekonomian dan terjadi perubahan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, termasuk desa-desa yang menjadi lokasi penelitian saat ini.

Berdasarkan data yang ada di desa perbatasan (Desa Cikiruh Wetan dan Desa Paniis) sebenarnya prasarana elektrifikasi dan air bersih sudah tersedia dengan berbagai keterbatasannya,

sedangkan sarana telekomunikasi masih belum merata kepemilikannya. Data yang diperoleh dari lapangan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

NO	SARANA PENDUKUNG EKONOMI	DESA CIKIRUH WETANG	DESA PANIIS
1	Pasar Desa	-	1
2	Irigasi	-	2

Tabel 4. Prasarana Pendukung Ekonomi  
Sumber: Desa Cikiruh Wetan dan Paniis, 2017 (diolah)

Dua jenis saran di atas termasuk yang utama bagi dukungan ekonomi desa, hal ini dibenarkan oleh Direktorat Sarana Prasarana Desa Kementerian Desa. Dilihat dari ketersediaan sarana pendukung ekonomi, desa Paniis Kecamatan Koroncong sebenarnya lebih berpeluang untuk menggerakkan perekonomian desa, karena dengan adanya pasar paling tidak ada aktivitas ekonomi yang untuk jangka panjang berpotensi untuk membuka lapangan kerja (minimal berdadang atau berwirausaha). Namun prasarana pasar yang ada belum berfungsi dengan semestinya (sebagaimana telah diuraikan pada analisis daya beli). Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah desa setempat, organisasi perangkat daerah yang terkait serta pelaku-pelaku ekonomi yang ada di desa dan sekitar Desa Paniis. Untuk jangka panjang prasarana pasar tersebut dengan keadaan

sekarang yang tidak terawat maka tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan akan mengalami kerusakan yang cukup berarti, hal berarti bahwa prasarana pendukung ekonomi (pasar) tidak serta merta dapat mendongkrak perekonomian masyarakat desa bila tidak ditunjang dengan aktivitas lain yang benar-benar signifikan oleh masyarakat desa setempat.

Keberadaan sarana irigasi di desa Paniis sebenarnya relevan dan dibutuhkan karena merupakan desa yang berbasis pertanian, hanya persoalannya terkadang keberadaan irigasi kurang mendapat perhatian baik dari masyarakat tani setempat, pemerintah desa maupun instansi terkait lainnya. Di samping itu yang perlu mendapat perhatian semua pihak adalah jangan sampai pasokan air dalam irigasi terjadi kekurangan debit air, sebab banyak bukti menunjukkan bahwa

saluran irigasi telah kehilangan sumber airnya, sehingga irigasi sama sekali tidak berfungsi padahal dibangun dengan biaya yang tidak sedikit.

Keberadaan prasarana irigasi di Desa Paniis sebenarnya telah mendorong usaha pertanian di desa tersebut, jadi yang perlu dipikirkan adalah sejauh mana irigasi itu selalu dipenuhi dengan volume air yang memadai, sejauhmana aktivitas pertanian masyarakat dan sejauhmana perawatan oleh para petani terhadap keberadaan prasarana irigasi yang ada. Semua ini perlu dukungan dan pembinaan dari Kepala Desa beserta perangkatnya, juga pihak instansi terkait dan tokoh masyarakat. Bila instansi pemerintah hanya membangun dan menyediakan tanpa ada pembinaan dan dorongan secara berkelanjutan maka kondisi irigasi tidak menutup kemungkinan bernasib sama dengan prasarana pasar yang ada di Desa Paniis.

Sementara di desa Cikiruh Wetan hal ini belum dimiliki, karena aktivitas mereka adalah nelayan/melaut, namun di Desa Cikiruh Wetan ada pelelangan ikan, ada pasar yang terletak di desa tetangga namun sangat mudah diakses oleh masyarakat desa Cikiruh Wetan, namun demikian prasarana pasar yang ada fungsinya perlu lebih ditingkatkan, terutama oleh pelaku usaha masyarakat

setempat sehingga meningkatkan taraf hidup mereka.

Pemerintah Daerah melalui instansi terkait, perlu memikirkan untuk penyediaan fasilitas pasar di Desa Cikiruh Wetan, mengingat desa ini punya potensi wisata pantai dan hasil perkebunan lain yang bisa dikembangkan. Keberadaan pasar akan memudahkan bagi wisatawan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, jenis makanan khas dan oleh-oleh cidera mata lainnya. Namun demikian masyarakat setempat harus lebih ulet dalam menjalankan usahanya melalui penggunaan prasarana pasar serta merawat pasar itu sehingga kebersihan tetap terjaga, tidak kumuh dan menarik wisatawan.

Jadi dalam analisis pemberdayaan masyarakat, memfungsikan prasarana pasar Desa Paniis secara maksimal perlu mendapat prioritas, sedangkan guna menjaga kebutuhan pasokan air perlu dipikirkan keberadaan embung desa di Paniis. Selanjutnya kebutuhan pasar di desa Cikiruh Wetan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pejabat kecamatan setempat.

### **Prasarana Pemukiman**

Prasarana pemukiman merupakan kebutuhan dasar guna berfungsinya suatu lingkungan yang dihuni oleh sekelompok orang yang bermukim secara tetap.

Prasarana pemukiman dapat merupakan tanggung jawab individu dan sekaligus kelompok masyarakat. Prasarana pemukiman dapat menunjukkan tingkat kebersihan dan ketertiban masyarakat yang bersangkutan, sekaligus juga menggambarkan kondisi kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Lingkungan permukiman menurut Sihono (2003:20) meliputi: jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, jaringan saluran air hujan untuk pencegahan banjir, jaringan jalan untuk mobilitas orang dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur.

Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna. Kondisi dan kinerja prasarana pemukiman akan berpengaruh pada kelancaran aktifitas dari masyarakat

sebagai pengguna atau pemanfaat prasarana. Sementara itu upaya-upaya perbaikan lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan prasarana dengan kebutuhan masyarakat.

Pendapat di atas memperlihatkan bahwa prasarana pemukiman sangat tergantung pada kebutuhan masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut, namun demikian ada persyaratan tertentu yang harus disadari dan dilaksanakan bersama oleh setiap anggota warga masyarakat bila ingin menghendaki lingkungan yang layak menurut kesehatan, kebersihan dan keindahan pemukimannya. Hal yang terakhir ini seringkali terabaikan oleh warga penduduk setempat, yang disebabkan oleh kesadaran warganya dan bisa jadi karena kurang kemauan yang kuat dari mereka untuk menata lingkungan pemukiman yang memenuhi kesehatan, tertib dan asri. Data prasarana pemukiman di Desa Paniis dan Desa Cikiruh Wetan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

NO	JENIS PRASARANA	DESA CIKIRUH WETANG	DESA PANIIS
1	Air bersih	1	16 (Termasuk PUI)
2	Jamban Umum	2	3
3	Listrik	Ada	Ada
4	Saluran Jamban Air	Tidak setiap rumah ada	Tidak setiap rumah ada

Tabel 5. Prasarana Pemukiman

Sumber: Desa Cikiruh Wetan dan Paniis, 2017 (diolah)



Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa ketersediaan air bersih untuk desa paniis jauh lebih memadai, dibanding dengan desa Cikiruh Witan, karena memang di Paniis sedang mendapat bantuan dari pemerintah, sementara di Cikiruh Wetan tampaknya belum mendapat bantuan, padahal biasanya di desa pesisir pantai sangat sering mengalami kekurangan air bersih, karena air tanah biasanya agak terasa asin. Untuk itu pihak instansi terkait khususnya Dinas PU dan Perumahan Rakyat perlu memberikan perhatian yang serius terkait ketersediaan air bersih di Desa Cikiruh Wetan, namun demikian semua elemen masyarakat, baik di Desa Paniis maupun di Desa Cikiruh Wetan perlu merawat keberadaan prasarana air bersih tersebut sehingga dapat berguna secara berkelanjutan bagi semua warga masyarakat.

Selanjutnya untuk sarana jamban umum kedua desa ini relatif sudah ada, walaupun ketercukupannya masih dipertanyakan, mengingat jumlah jamban umum yang masih sangat sedikit di kedua desa tersebut. Di samping itu keberadaan jamban umum perlu didukung ketersediaan air, bila tidak dapat menjadi tempat yang sangat jorok dan kumuh. Selanjutnya yang masih perlu mendapat pemantauan adalah jangan sampai masih

ada anggota masyarakat yang buang air besar di kebun, walaupun hasil wawancara dengan perangkat desa perilaku seperti ini sudah sangat berkurang.

Ketersediaan sarana listrik sudah terpenuhi dengan baik, yang perlu mendapat perhatian jangan sampai sering terjadi penerangan yang tersendat-sendat atau terjadi giliran pemadaman listrik dan perilaku masyarakat yang mencuri KWH listrik.

Sementara itu saluran pembuangan air jamban di kedua desa tersebut masih banyak yang tidak memiliki, walaupun ada cenderung masih kurang terawat bahkan terlihat kumuh. Kondisi ini masih sangat memprihatinkan, padahal hal ini mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga dan menata lingkungan yang sehat, tertib dan indah, di samping itu juga menunjukkan tingkat kesadaran hidup sehat yang rendah.

Jadi dalam kajian pemberdayaan masyarakat, perlu dipikirkan penambahan air bersih di desa Cikiruh Wetan, sedangkan jamban umum untuk kedua desa tersebut perlu penambahan baik secara kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya untuk saluran pembuangan air jamban perlu mendapat perhatian serius di kedua desa ini, baik perhatian dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas

Kesehatan dan instansi terkait lainnya, perhatian dari Pemerintah Desa setempat dan terutama perhatian serta kesadaran dari masyarakat sendiri khususnya dari masing-masing keluarga.

## **PEMBAHASAN**

Eksistensi suatu masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari dukungan sarana prasarana yang ada di desanya, karena itu upaya membangun sarana prasarana yang layak perlu terus mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah melalui instansi terkait, di samping itu tindakan perawatan juga jauh lebih penting agar keberadaan dan kemanfaatannya terus dirasakan masyarakat, hal yang terakhir ini bukan hanya tanggung jawab instansi terkait tetapi yang lebih penting adalah oleh masyarakat itu sendiri secara konsisten, sebab bila perawatan kurang baik mengakibatkan terjadi penurunan fungsi maka yang rugi masyarakat itu sendiri. Perangkat desa setempat dalam aspek perawatan perlu melakukan pemantauan, bimbingan dan motivasi pada masyarakat untuk menjaga sarana prasarana yang ada.

Berdasarkan uraian terkait sarana prasarana yang ada di desa perbatasan, maka model pemberdayaan masyarakat melalui dukungan sarana prasarana dapat dilihat pada Gambar 1.

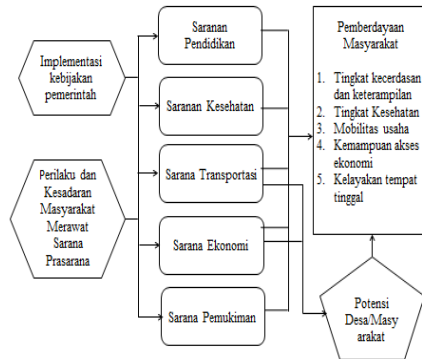
Beranjak dari uraian di atas, maka analisis model dimulai dari kebijakan dan implementasinya oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui instansi terkait melakukan pembangunan berbagai sarana prasarana yang meliputi: 1) sarana pendidikan; 2) sarana kesehatan; 3) sarana transportasi; 4) sarana ekonomi dan 5) sarana pemukiman, yang diawali dengan proses identifikasi permasalahan, kebutuhan masyarakat, dukungan kondisi alam setempat, pengkajian kelayakan, dan akhirnya tindakan pembangunannya, kemudian bersama-sama dengan masyarakat dan perangkat desa dilakukan monitoring dan perawatan terhadap sarana prasarana yang telah dibangun secara berkelanjutan.

Kesadaran, kebersamaan, keseriusan dan ketulusan setiap warga desa sangat dibutuhkan sehingga tindakan perawatan tidak saling mengandalkan dan jangan sampai ada anggota masyarakat yang hanya berpikir semata-mata mengambil manfaat dari keberadaan sarana-prasarana yang ada, sementara kontribusinya merawatnya sangat minim. Artinya upaya memberi pencerahan, pemahaman, kemauan dan kemampuan setiap anggota masyarakat untuk menjaga sarana prasarana yang ada di desa merupakan bagian yang sangat penting, sebab sangat sering terjadi sarana

prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah begitu saja ditinggalkan oleh masyarakat setelah mereka memanfaatkan dengan sangat semaksimal kemudian

begitu saja ditinggalkan, tidak dipikirkan dan tidak dicari solusi agar sarana prasarana itu bisa berfungsi dan memberi kemanfaatan secara berkelanjutan.

Gambar 1. Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Dukungan Sarana-Prasarana



Sarana prasarana kesehatan (puskesmas dan puskesmas pembantu) dan pendidikan (sekolah-sekolah) merupakan sarana dasar bagi setiap komunitas masyarakat, melalui ketersediaan dua sarana prasarana ini sehingga tingkat keberdayaan masyarakat menjadi meningkat yang ditandai dengan terciptanya kesehatan masyarakat semakin merata dan berkualitas, tidak terjadinya ancaman penyakit yang mematikan dan tercukupinya kebutuhan gizi keluarga, selanjutnya melalui lembaga-lembaga pendidikan akan tercipta peningkatan wawasan berpikir, kecerdasan dan keterampilan anggota warga masyarakat, yang pada gilirannya mereka semakin terbuka pola berpikirnya dalam menghadapi kesulitan sosial ekonomi yang melilit keluarganya, mereka akan semakin tertanam cara berpikir kritis, selektif,

kreatif, inovatif, perspektif, berusaha mengikuti dan mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan demikian mereka akan jauh lebih mampu untuk berkembang dan membentuk keluarga yang mapan dan mandiri.

Pembangunan prasarana transportasi dan ekonomi, selain terlebih dahulu perlu dilakukan study kelayakan dan pengkajian mendalam, tak kalah pentingnya adalah harus memperhatikan potensi alam yang ada di desa, geografis desa dan potensi masyarakat setempat, misal desa tersebut penghasil alam yang perlu pengangkutan dengan truk besar, maka kualitas prasarana jalan harus dibangun sesuai beban kendaraan yang akan melintas, begitu juga dengan pembangunan prasarana ekonomi sangat terkait dengan potensi usaha dan aktivitas masyarakatnya, bila potensi masyarakat

desa menghasilkan hasil alam yang ringan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat maka dapat dibangun pasar yang layak sebagai tempat bertransaksi di antara anggota masyarakat, bila usaha masyarakat menghasilkan produk *home industry* dan hasil alam yang sangat diminati orang-orang dari luar dengan omzet transaksi yang besar maka pasar yang dibangun harus jauh lebih besar dan sangat relevan dengan tingkat transaksi seperti itu, selanjutnya bila masyarakat itu pencahariannya nelayan dan lingkungan pesisir maka pembangunan tempat pelelangan ikan dan tempat wisata bahari perlu mendapat perhatian yang serius. Jadi melalui dua prasarana ini akan meningkatkan mobilitas orang dan usaha dari desa ke luar daerah serta dari luar daerah masuk ke desa, bila hal ini berjalan terus dan berkembang maka akses ekonomi akan semakin mudah, penduduk setempat semakin punya pengalaman dan kemampuan dalam akses usahanya dan akhirnya roda perekonomian desa secara bertahap terus berkembang.

Pembangunan prasarana pemukiman, sebenarnya yang dominan bertanggung jawab dimulai dari setiap keluarga dan rumah tangga masing-masing, sedangkan tanggung jawab pemerintah adalah prasarana pemukiman bagian luar yang merupakan saluran

pembuangan dari tiap-tiap rumah tangga. Untuk di desa hal ini memang tidak selalu dilakukan oleh pemerintah, kecuali di perkotaan maka prasarana pemukiman dimulai pembangunannya oleh pihak pengembang kemudian pembuangan luarnya oleh pemerintah daerah. Sementara di pedesaan hal ini masih minim dilakukan oleh pemerintah daerah, selain itu juga masih banyak rumah tangga di desa yang tidak membuat tempat pembuangan air mandi dan cuci secara layak, sehingga air mengalir ke jalan dan ke rumah-rumah tetangga yang lain, hal jelas menimbulkan kesan kehidupan yang kumuh, walaupun di lokasi penelitian untuk pembuangan air besar, relatif sudah dimiliki setiap rumah tangga. Untuk jangka panjang tampaknya perlu diberi penyadaran dan bimbingan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat kepada para kepala keluarga terkait perlunya pembuatan prasana pemukiman yang layak sehingga tercipta pemukiman yang memenuhi kelayakan tempat tinggal, terlihat tertib dan indah serta terhindar dari timbulnya berbagai penyakit.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kondisi sarana prasarana yang ada di lokasi penelitian, prasarana pendidikan secara kuantitatif di Desa Cikiruh Wetan lebih baik (sudah ada SMP dan SMK) dibanding dengan di Desa Paniis yang hanya ada SD, Madrasah Diniyah dan PAUD. Prasarana kesehatan di kedua desa relatif sama, hanya di Desa Paniis jumlah posyandu lebih banyak. Prasarana transportasi terutama dilihat dari panjang jalan desa dan jalan lingkungan relatif tidak ada perbedaan, hanya Desa Paniis jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Pandeglang lebih dekat dibanding dengan Desa Cikiruh Wetan. Prasarana pendukung ekonomi terutama pasar desa dan irigasi yang merupakan program nasional, di Desa Paniis sudah ada walaupun untuk pasar desa tidak berfungsi bahkan mulai mengalami kerusakan, sementara di desa Cikiruh Wetan kedua prasarana ini belum ada.

Prasarana pemukiman untuk air bersih di Desa Paniis lebih baik dibanding dengan Desa Cikiruh Wetan padahal sebagai daerah pesisir jauh lebih dibutuhkan karena air tanah dekat laut kurang baik untuk dikonsumsi, jamban umum keduanya masih belum memadai, listrik sudah memadai, saluran pembuangan air jamban di kedua desa

tidak setiap rumah tersedia (pembuangannya ke kebun, sawah bahkan air meluap ke jalan), walaupun ada pembuangan jamban cenderung kurang terawat bahkan terlihat kumuh. Hal ini mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga dan menata pemukiman yang sehat, tertib dan indah.

Model pemberdayaan masyarakat melalui dukungan sarana prasarana, dimulai dari kebijakan dan implementasinya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui instansi terkait melakukan pembangunan berbagai sarana prasarana, antara lain: 1) sarana pendidikan; 2) sarana kesehatan; 3) sarana transportasi; 4) sarana pendukung ekonomi dan 5) sarana pemukiman, yang diawali dengan proses identifikasi permasalahan, kebutuhan masyarakat, dukungan kondisi alam setempat, pengkajian kelayakan, dan akhirnya tindakan pembangunannya, kemudian dengan kesadaran dan perilaku masyarakat bersama-sama dengan perangkat desa melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang telah dibangun secara berkelanjutan (artinya jauh lebih penting perawatan sarana prasarana oleh masyarakat secara terus-menerus daripada hanya sekedar membangun) serta

masyarakat memanfaatkannya secara wajar dan proporsional.

Bila semua ini dijalankan maka secara bertahap tingkat kecerdasan dan keterampilan masyarakat meningkat, tingkat kesehatan meningkat, kemudahan mobilitas masyarakat, peluang akses ekonomi lebih besar dan tercipta lingkungan tempat tinggal yang layak. Semua ini akan mewujudkan indikasi tingkat keberdayaan masyarakat desa di masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almasri dan Deswimar, Devi (2014) *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Jurnal EL-RIYASAH Vol 5 No. 1 Tahun 2014
- Arikunto, Suharsimi (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Asnudin, Andi (2005) *Manajemen Proyek Konstruksi*, Palu: UNTAD Press
- Asnudin, Andi (2009) *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat*. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/viewFile/598/518>
- Badan Pusat Statistik (2017) *Kabupaten Pandeglang dalam Angka*.
- Herdiansyah, Haris (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- <http://nasional.inilah.com/read/detail/2329674/sarana-dan-prasarana-desa-untuk-atasi-kemiskinan>.
- Imansyah S, Budi. (2017) *Sistem Transportasi dan Dampak Bagi Lingkungan*. <https://walhijabar.wordpress.com/2007/12/31/sistem-transportasi-dan-dampak-bagi-lingkungan>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2016. *Sarana Prasarana Pendukung Ekonomi Desa*, Cetakan Pertama. Jakarta: Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Desa
- Pranadji, Tri (2006) *Model Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan untuk Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering, Studi Penguatan Modal Sosial dalam Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali*. Bogor: Pascasarjana IPB
- Sihono (2003) *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Prasarana Pasca Peremajaan Lingkungan Permukiman di Mojosongo Surakarta*. Semarang: UNDIP, Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
- Widjajanti, Kesi (2011) *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.15-27 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang